

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Penelitian Terdahulu

Dwiyanti (2022) melakukan penelitian tentang Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, *whistleblowing system* Dan Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan *Fraud* Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dan moralitas individu berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan *fraud*, namun *whistleblowing system* dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Moralitas individu dapat memperkuat hubungan sistem pengendalian internal pada pencegahan *fraud*, namun memperlemah hubungan *whistleblowing system* dan komitmen organisasi pada pencegahan *fraud*.

Kindagen (2019) meneliti tentang pengaruh secara parsial maupun simultan dari *good governance*, asimetri informasi dan aspek tekanan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah Kota Manado. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa secara parsial *good governance* berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kecenderungan kecurangan, asimetri informasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kecenderungan kecurangan, aspek tekanan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kecenderungan kecurangan dan

secara simultan *good governance*, Asimetri Informasi dan Aspek Tekanan berpengaruh signifikan terhadap Kecenderungan Kecurangan.

Mita & Indraswarawati (2021) melakukan penelitian tentang pengaruh religiusitas, moralitas individu dan efektivitas sistem pengendalian intern terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi, moralitas individu tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) Akuntansi, efektivitas sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) Akuntansi.

Megawati & Reskino (2023) melakukan penelitian tentang pengaruh pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan komitmen organisasi terhadap pencegahan kecurangan dengan moralitas individu sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Sedangkan moralitas individu memperkuat hubungan antara pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan komitmen organisasi terhadap pencegahan kecurangan. Sedangkan besarnya pengaruh pencegahan kecurangan dapat dijelaskan dari adanya pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan komitmen organisasi, serta efek moderasi moralitas individu sebesar 81,2%.

Widiantari & Bella (2023) melakukan penelitian tentang Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Badung dengan menjadikan Moralitas Individu sebagai variabel moderasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Good corporate governance dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud pada BPKAD Kabupaten Badung. Moralitas individu mampu memperkuat hubungan good corporate governance terhadap pencegahan fraud pada BPKAD Kabupaten Badung.

Tabel 2. 1 Riview Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul Artikel	Metode Penelitian	Hasil
1.	Dwiyanti (2022)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, <i>Whistleblowing</i> System Dan Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi	Kuantitatif	Sistem pengendalian internal dan moralitas individu berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan kecurangan, namun <i>whistleblowing system</i> dan komitmen organisasi tidak pengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Moralitas individu dapat memperkuat hubungan sistem pengendalian internal pada pencegahan kecurangan, namun memerlemah hubungan <i>whistleblowing system</i> dan komitmen organisasi pada pencegahan kecurangan

No.	Nama Penulis	Judul Artikel	Metode Penelitian	Hasil
2.	Kindagen (2019)	Pengaruh Implementasi <i>Good Governance</i> , Asimetri Informasi dan Aspek Tekanan Terhadap Kecenderungan Kecurangan (<i>Fraud</i>) Pada SKPD Pemerintah Kota Manado	Kuantitatif	Secara parsial <i>Good Governance</i> berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Asimetri Informasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kecenderungan kecurangan. Aspek tekanan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kecenderungan kecurangan dan secara simultan <i>good governance</i> , Asimetri Informasi dan Aspek Tekanan berpengaruh signifikan terhadap Kecenderungan Kecurangan.
3.	Mita & Indraswarawati (2021)	Pengaruh Religiusitas, Moralitas Individu, Dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan (<i>Fraud</i>) Akuntansi (Studi Empiris Pada Lpd Se-Kecamatan Gianyar)	Kuantitatif	Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan moralitas individu dan efektivitas sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
4.	Megawati & Reskino (2023)	Pengaruh Pengendalian Internal, <i>Whistleblowing System</i> , dan Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Moralitas Individu	Kuantitatif	pengendalian internal, <i>whistleblowing system</i> , dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Sedangkan moralitas individu memperkuat pengaruh antara pengendalian internal, <i>whistleblowing system</i> , dan komitmen organisasi terhadap pencegahan

No.	Nama Penulis	Judul Artikel	Metode Penelitian	Hasil
		Sebagai Variabel Moderasi		kecurangan. Sedangkan besarnya pengaruh pencegahan kecurangan dapat dijelaskan dari adanya pengendalian internal, <i>whiteblowing system</i> , dan komitmen organisasi, serta efek moderasi moralitas individu sebesar 81,2%.
5.	Widiantari & Bella (2023)	Moralitas Individu Sebagai Pemoderasi Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Badung	Kuantitatif	<i>Good corporate governance</i> dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud pada BPKAD Kabupaten Badung. Moralitas individu mampu memperkuat hubungan <i>good corporate governance</i> terhadap pencegahan <i>fraud</i> pada BPKAD Kabupaten Badung.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Teori *Fraud Hexagon*

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan yang cukup pesat seperti Teori *fraud hexagon* yang dikemukakan oleh Georgios L. Voutsinas pada tahun 2019 merupakan teori penyempurnaan dari teori *fraud triangle* yang sebelumnya dikemukakan oleh Cressey pada tahun 1953, kemudian teori *fraud diamond* yang dikemukakan oleh Wolfe & Hermanson pada tahun 2004, dan teori *fraud pentagon* dikemukakan oleh Crowe Horwath pada tahun 2011.

Vousinas (2019) teori *fraud Hexagon* terdiri dari enam elemen yang terdiri dari :

1) Tekanan (*Pressure*)

Pelaku pada saat ini melakukan kejahatan yang didorong oleh tekanan dimana hal ini dapat berasal dari tekanan akan kebutuhan keuangan, target keuangan yang menurun, perekonomian keluarga yang mendesak, dan lainnya, sehingga mendorong pelaku untuk berani melakukan pencurian kas perusahaan.

2) Kapabilitas (*Capability*)

Hal ini menunjukkan seberapa besar daya dan kapasitas dari suatu pihak untuk melakukan kecurangan di lingkungan perusahaan. Pada poin ini, salah satu contoh yang menggambarkan dengan jelas adalah saat terjadinya perubahan direksi yang merupakan terciptanya wujud *conflict of interest*.

3) Kesempatan (*Opportunity*)

Bila terdapat kelemahan dalam pengendalian internal perusahaan, pengawasan yang melemah mendorong seseorang untuk bertindak dalam melakukan kecurangan. Celah ini dapat mengundang hal yang fatal bagi perusahaan dimana kelemahan dalam pengendalian internal yang berjalan dimanfaatkan oleh seseorang.

4) Rasionalisasi (*Rationalization*)

Pada poin tersebut, pelaku akan melakukan pembenaran atau merasa bahwa tindakannya benar saat mereka melakukan kecurangan.

Perilaku tersebut muncul disaat seseorang merasa telah berbuat lebih bagi perusahaan, sehingga mereka terdorong untuk mengambil keuntungan yang didasari pemikiran bahwa hal tersebut sah-sah saja selama mereka bekerja dengan benar

5) Ego (*Arrogance*)

Arogansi adalah sikap superioritas yang menyebabkan keserakahan dari orang yang percaya bahwa pengendalian internal tidak berlaku secara pribadi. Hal ini disebabkan saat seseorang merasa lebih tinggi kedudukannya ketimbang pihak lainnya.

6) Kolusi (*Collusion*)

Menurut Georgios L. Vousinas (2019) kolusi merujuk kepada perjanjian yang menipu suatu pihak dimana pihak yang tertipu sebanyak dua orang atau lebih, untuk satu pihak yang bertujuan untuk mengambil tindakan lain untuk beberapa tujuan kurang baik, seperti menipu pihak ketiga dari hak yang dimilikinya.

2.2.2 *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Teori tindakan beralasan (*Theory of Reasoned Action*) yang diusulkan oleh Ajzen dan Fishbein (1980), dan diperbaharui dengan teori perilaku direncanakan (*theory of planned behavior*) oleh Ajzen (1991), telah digunakan selama dua dekade masa lalu untuk meneliti keinginan dan perilaku berbagi. Teori tindakan beralasan Ajzen dan Fishbein (1980) mengasumsikan bahwa perilaku ditentukan oleh keinginan individu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu atau sebaliknya.

Keinginan ditentukan oleh dua variabel independen termasuk sikap dan norma subyektif. Teori perilaku direncanakan ini dikembangkan dari teori tindakan beralasan dengan memasukkan tambahan yaitu membangun perilaku kontrol yang dirasakan Teori Ajzen tentang sikap terhadap perilaku mengacu pada derajat mana seseorang memiliki penilaian evaluasi menguntungkan atau tidak menguntungkan dari perilaku dalam sebuah pertanyaan, (Ajzen, 1991). Hal yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan atau tidak dilakukannya hal tersebut tidak hanya ditentukan oleh sikap dan norma subjektif saja melainkan persepsi seseorang terhadap kontrol yang dapat dilakukan bersumber pada keyakinan terhadap kontrol tersebut. Meskipun begitu, baik TRA maupun TPB tetap menganggap prediktor terbaik oleh seseorang dalam berperilaku adalah karena adanya intensi atau niat yang ditentukan oleh 3 faktor berikut:

1. *Behavior Beliefs* yaitu hal-hal yang diyakini oleh seseorang terhadap suatu perilaku dari sisi positif dan negatif, dan sikap terhadap suatu perilaku yang cenderung untuk dilakukan dalam bentuk suka ataupun tidak suka.
2. *Normative Beliefs* yaitu keyakinan seseorang tentang harapan normative orang lain yang berpengaruh bagi orang tersebut dan dapat menjadi memotivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
3. *Control Beliefs* yaitu keyakinan seseorang mengenai hal-hal yang dapat mendukung atau menghambatnya dalam berperilaku. Hambatan ini bisa diperoleh dari dalam diri individu tersebut seperti pengetahuan

keterampilan, dan pengalaman serta dari lingkungan seperti adanya ketersediaan waktu, dan tersedianya fasilitas.

2.2.3 *Good Governance*

Good Governance adalah tindakan suatu lembaga pemerintah yang berpedoman pada kepentingan rakyat dan standar yang berlaku untuk mewujudkan tujuan negara. *Good Governance* yang baik berkaitan dengan proses, hasil politik, dan kelembagaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan. Menurut Undang - Undang No. 30 Tahun 2014 hukum ini menjadi dasar dalam menyelenggarakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemerintahan yang baik dalam upaya mencegah praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. Penerapan manajemen dengan pembangunan yang kompak dan bertanggung jawab yang sesuai dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien dapat menghindari kesalahan alokasi dana dan investasi serta mencegah korupsi politik dan administrasi. Menjalankan disiplin anggaran untuk menciptakan *legal and political framework* bagi tumbuhnya suatu aktivitas-aktivitas dalam dunia usaha.

Menurut Hasibuan *et al.*, (2022) ada beberapa indikator di dalam *Good Governance* sendiri, antara lain:

- 1) Partisipasi (*participation*) adalah setiap masyarakat memiliki kekuasaan suara yang sama dalam menentukan keputusan, kebebasan dalam berbicara, dan berpartisipasi dengan sehat secara langsung atau melalui badan perwakilan yang sebanding dengan keinginan dan harapannya.

- 2) Transparansi (*transparency*) adalah suatu prinsip yang harus bersifat terbuka dan diakses oleh semua orang serta dapat dipahami sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang relevan terkait penyelenggaraan pemerintahan.
- 3) Akuntabilitas (*accountability*) adalah bentuk kewajiban dan prinsip dalam tata kelola pemerintah yang dimana pemerintah daerah memiliki pertanggungjawaban dalam melakukan kinerja mereka dengan melakukan pelayanan publik yang baik sehingga terwujudnya tata kelola yang baik.
- 4) Efektivitas (*effectiveness*) adalah proses pengukuran keberhasilan dan pencapaian suatu organisasi untuk memperoleh tujuan yang telah direncanakan sebaik mungkin.

2.2.4 Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah istilah yang diterapkan untuk menggambarkan berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen organisasi untuk mengontrol dan membimbing karyawan dalam melaksanakan tugas. Megawati & Reskino (2023) Pengendalian internal merupakan bagian yang sangat penting agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Semakin besar perusahaan semakin penting pula arti dari pengendalian internal dalam perusahaan tersebut. Mita & Indraswarawati (2021) Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Suatu keberhasilan tindakan entitas dalam mencapai tujuan yaitu untuk menjaga

ketaatan terhadap hukuman dan peraturan. Pengendalian internal telah diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dalam rancangan undang-undang ini merupakan adopsi dari konsep pengendalian internal yang dicetuskan pada tahun 1992 oleh The Committee of Sponsoring Organization (COSO). Secara teoretis definisi pengendalian internal yang digagas COSO ialah bahwa pengendalian internal merupakan suatu proses yang terorganisir dan dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, karyawan unit bisnis lainnya, yang dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam masalah; keandalan dalam pelaporan keuangan, ketaatan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasi. Novitasari (2022) Variabel sistem pengendalian internal diukur dari berbagai 5 indikator berikut :

1) Lingkungan pengendalian

Pada lingkungan pengendalian senior harus memberikan contoh yang baik bagi pegawai lainnya. Penerapan aturan pegawai terkait dengan perilaku dan kode etik pegawai.

2) Penilaian risiko

Pada penilaian risiko seluruh pegawai dituntut untuk bisa mengatasi segera resiko yang akan terjadi pada instansi seperti melakukan analisis risiko secara lengkap dan efektif terhadap permasalahan yang ada.

3) Aktivitas pengendalian

Aktivitas pengendalian ialah proses otorisasi dokumen dari transaksi sesuai prosedur yang dilakukan oleh pegawai. Pada kegiatan ini pegawai instansi melakukan pemisahan tugas yang sesuai dengan bidangnya masing – masing.

4) Informasi dan komunikasi

Informasi tentang pekerjaan yang di kerjakan dikomunikasikan secara tepat dan akurat, sedangkan komunikasi dilakukan secara terbuka dengan sesama pegawai, masyarakat dan aparat pengawas internal dalam memberikan saran dan masukan.

5) Pemantauan

Atasan melakukan pemantauan pada saat pegawai melaksanakan tugasnya. Atasan melakukan evaluasi berkelanjutan pada pegawai untuk melakukan pengendalian internal.

2.2.5 *Whistleblowing System*

Whistleblowing system adalah sistem yang digunakan oleh organisasi untuk melaporkan pelanggaran. *whistleblowing system* biasanya dijalankan secara tersembunyi. Artinya, *whistleblowing* muncul apabila terdapat insiden yang mengarah pada kepribadian karyawan dengan kepentingan organisasi. Siregar & Surbakti (2019) *whistleblowing system* merupakan wadah yang disediakan untuk mencegah, memperkecil kerugian yang mungkin terjadi, dan menindaklanjuti pelanggaran dengan melaporkan jika terdapat hal-hal yang mencurigakan dan menyimpang terjadi. Pengungkapan pelanggaran

semata-mata hanya dilakukan dengan itikad yang baik, bukan atas keluhan pribadi terhadap peraturan kebijakan perusahaan yang didasari oleh fitnah.

Komite Kebijakan Nasional Governance (2008) menyatakan bahwa indikator *whistleblowing system* terdiri dari tiga aspek antara lain :

1. Aspek Struktural
Aspek struktural adalah aspek yang berisi tentang beberapa elemen infrastruktur *whistleblowing system* seperti Pernyataan Komitmen, Perlindungan Pelapor, dan SDM pengelola *whistleblowing*.
2. Aspek Operasional
Aspek operasional merupakan aspek yang berkaitan dengan mekanisme dan prosedur kerja *whistleblowing system*
3. Aspek Perawatan
Perawatan Aspek perawatan merupakan aspek yang memastikan bahwa *whistleblowing system* ini dapat berkelanjutan dan meningkatkan efektivitasnya

2.2.6 *Fraud Intention*

Fraud Intention Adalah keinginan seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan baik itu dalam keuangan maupun non-keuangan. Chandrayatna & Sari (2019) Kecenderungan kecurangan akuntansi dapat berupa penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan. Kecurangan pada instansi

pemerintah tidak hanya melibatkan orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi tetapi juga orang-orang yang berada dibawahnya, serta tidak hanya terjadi di lingkungan pemerintah pusat.

Indikator dalam pengukuran *Fraud Intention* mengacu pada *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*. dimana dalam penelitian ini dilakukan dengan lima item pernyataan. Variabel kecurangan (*fraud*) diukur dengan indikator sebagai berikut:

a. Tekanan

Tekanan atau *pressure* ini berhubungan dengan niat seseorang untuk melakukan kecurangan, karena seseorang yang melakukan kecurangan pasti memiliki motivasi atau dorongan tersendiri, seperti tekanan yang disebabkan oleh kebutuhan yang mendesak.

b. Kesempatan

Peluang atau *opportunity* adalah kesempatan seseorang untuk melakukan kecurangan. Adapun contoh kecurangan yang ditimbulkan akibat adanya kesempatan seperti, melakukan multijob rekan kerja yang lain dengan imbalan yang sesuai saat tidak diawasi oleh atasan.

c. Kesengajaan

Kesengajaan para pelaku kecurangan biasanya dilanjutkan dengan membenaran sikap pelaku agar tindakan kesalahan yang terjadi menjadi tindakan yang wajar. Misalkan, Pegawai sengaja membuat nota sendiri jika tidak diberi nota pembelian atau pengeluaran.

2.2.7 Moralitas Individu

Moralitas Individu merupakan kualitas diri yang terbentuk dari kebiasaan dalam melakukan suatu tindakan, semakin baik kebiasaan seseorang maka moralitas dalam diri seseorang maka niatan untuk melakukan tindakan yang tidak etis semakin berkurang. Megawati & Reskino (2023) Moralitas mempunyai arti yang pada dasarnya sama dengan moral, yaitu kemampuan memahami hal yang benar dan salah. Mita & Indraswarawati (2021) Apabila yang dilakukan individu bernilai baik di masyarakat tersebut serta dapat diterima dan menyenangkan lingkungannya, maka individu tersebut memiliki moralitas yang baik. Novitasari (2022) Indikator moralitas individu yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Kepribadian

Pegawai yang memiliki kepribadian yang baik akan saling menghargai tugas dan tanggungjawab masing – masing serta melakukan interaksi dengan sopan antar sesama pegawai.

2) Perilaku

Perilaku adalah serangkaian tindakan yang dibuat oleh individu, organisme, sistem, atau entitas buatan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri atau lingkungannya.

3) Etika

Etika adalah serangkaian tindakan yang menjadi kebiasaan seseorang seperti bertingkah laku dan berucap baik dalam berinteraksi sehingga dijadikan kebiasaan.

2.3 Pengembangan Hipotesis

1) Pengaruh *Good Governance* Terhadap *Fraud Intention*

Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam organisasi agar transparan dalam informasi, menaati segala peraturan, mengurangi benturan kepentingan antar individu dalam organisasi dan memberikan hak-hak kepada individu secara adil, yang nantinya laporan pemerintah daerah (LPD) dapat menjadi lebih baik dalam penerapan sistem tata kelola dan mencegah munculnya *Fraud Intention*.

Di dalam *fraud hexagon* yang mendasari penelitian ini, Terdapat enam faktor yang dapat mendorong seseorang untuk berbuat curang, yakni tekanan, peluang, rasionalisasi, kapabilitas, ego dan kolusi. Praktik kecurangan yang semakin meningkat di suatu instansi mengakibatkan meningkatkan kesadaran berbagai pihak untuk melakukan upaya pencegahan dan pengurangan praktik kecurangan yang terjadi. Penerapan kebijakan *Good Governance* di suatu instansi diharapkan dapat menciptakan suasana kerja yang baik dan pengendalian internal perusahaan dapat ditingkatkan.

Menurut Hindistari & Putri (2016) *Theory of planned behavior* relevan untuk menjelaskan pengaruh prinsip-prinsip *Good Governance*. Dengan penerapan *theory of planned behavior* diharapkan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada laporan pemerintah daerah (LPD) dapat diminimalisir dengan memperhatikan sikap-sikap individu dalam organisasi sehingga visi, misi dan tujuan dapat tercapai. Selain itu dengan penerapan *Good Governance*, organisasi dapat sejalan dengan visi, misi dan tujuan

organisasi. Pada hasil penelitian Kindagen (2019) menjelaskan bahwa secara parsial *good governance* berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kecenderungan kecurangan.

H₁ : *Good Governance* berpengaruh terhadap *Fraud Intention*

2) Pengaruh pengendalian internal terhadap *Fraud Intention*

Terjadinya kecurangan disebabkan oleh *opportunity* (peluang) yang muncul pada perusahaan dengan berbagai macam masalah seperti kurang memadainya pengendalian internal, pemantauan yang lemah, kurang efektifnya komunikasi dalam menyampaikan informasi (Dwiyanti, 2022). minimnya pengawasan internal juga dapat memunculkan Ego (*arrogance*) atau keserakahan yang dilakukan oleh pelaku *fraud* dengan menyalahgunakan pengendalian internal organisasi. Sistem pengendalian internal merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara berkala oleh seluruh unit kerja baik pimpinan dan pegawai guna memperoleh keandalan data akuntansi, dapat melindungi aset perusahaan dan pemenuhan kepatuhan atas kebijakan perusahaan (Ayem & Kusumasari 2020).

Menurut Carpenter & Reimers (2005) *Theory of planned behaviour* mampu menjelaskan terkait dengan rencana untuk melakukan sesuatu termasuk rencana atau niat untuk melakukan kecurangan yang timbul dalam pikiran seseorang untuk melakukan penyelewengan tugas dan jabatan untuk melakukan kecurangan pada pengendalian internal. Hal ini berarti lemahnya sistem pengendalian internal organisasi dapat memberikan celah karyawan untuk melakukan *fraud*. Pentingnya mewujudkan sistem pengendalian

internal yang memadai akan menutup *oportunity* (peluang) seseorang untuk melakukan kecurangan. Semakin baik pengendalian internal yang diterapkan oleh suatu organisasi, maka semakin rendah niat pegawai untuk melakukan tindakan kecurangan (*fraud*).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Megawati dan Reskino (2023) menjelaskan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Hal ini berarti pengendalian internal sangat berperan aktif untuk mengatur dan mengawasi pemerintah daerah dalam menjalankan aktivitas manajemen yang efektif dan efisien agar dapat mencegah kecurangan.

H₂ : Pengendalian internal berpengaruh terhadap *Fraud Intention*

3) Pengaruh *whistleblowing system* terhadap *Fraud Intention*

Fraud Intention muncul didasari pada *pressure* (tekanan) yang dirasakan oleh seseorang. Desakan ekonomi dapat menjadi pemicu utama seseorang dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan kecurangan. Dengan adanya *whistleblowing* pada organisasi pemerintah dapat mempermudah pihak yang berwenang untuk mengidentifikasi indikasi kecurangan. *Whistleblowing system* merupakan suatu sistem untuk melaporkan tindakan kecurangan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang guna meminimalisir terjadinya *fraud* pada suatu organisasi (Prena & Kusmawan, 2020).

Fraud muncul didasari pada *pressure* (tekanan) yang dirasakan oleh seseorang. Desakan ekonomi dapat menjadi pemicu utama seseorang dapat melakukan *fraud* (Dwiyanti, 2022). Dengan adanya *whistleblowing* pada

perusahaan mudah untuk menemukan indikasi kecurangan. *Whistleblowing system* merupakan suatu sistem untuk melaporkan tindakan kecurangan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang guna meminimalisir terjadinya *fraud* pada suatu organisasi (Prena & Kusmawan, 2020).

Menurut *theory of planned behaviour*, sikap merupakan salah satu variabel yang dapat mempengaruhi niat dan perilaku seseorang. Selain itu, setiap individu akan menilai atau mengevaluasi secara subjektif terhadap pentingnya konsekuensi atau dampak tersebut. Wawo (2022) Dengan meningkatnya efektivitas tersebut maka akan mengurangi tindakan kecurangan seseorang karena adanya sistem tersebut. Sehingga, dengan adanya *whistleblowing system* yang dijalankan dengan baik maka akan mengurangi *Fraud Intention* bahkan mencegah kecurangan.

Penelitian ini diperkuat oleh hasil penelitian Dwiyanti (2022) bahwa *whistleblowing system* dan komitmen organisasi tidak pengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Penelitian lain milik Megawati & Reskino (2023) pengendalian internal, *whistleblowing sistem*, komitmen organisasi, dan moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Hal ini berarti semakin baik penerapan *whistleblowing system* maka pencegahan kecurangan semakin baik dan intensi kecurangan semakin kecil.

H₃ : *Whistleblowing system* berpengaruh terhadap *Fraud Intention*

- 4) Moralitas individu memoderasi hubungan antara *Good Governance* terhadap *Fraud Intention*

Moralitas merupakan kualitas mengenai baik buruknya perilaku seseorang, seseorang yang tidak bermoral cenderung akan bertindak untuk melakukan kecurangan yang akan merugikan orang lain. Maka moralitas Individu menjadi salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kecurangan khususnya pada organisasi atau instansi yang harus memiliki tanggung jawab moral. Keinginan melakukan kecurangan mempunyai keterkaitan dengan moralitas individu, Pernyataan tersebut tidak terlepas dari oknum pegawai berpotensi melakukan tindakan yang tercela apabila mempunyai *capability* (kemampuan) dengan memanfaatkan *oportunity* (kesempatan) untuk melakukan kecurangan. Namun apabila seseorang memiliki moralitas individu yang baik tidak mudah tergoda untuk melakukan hal tersebut.

Menurut Widiantari & Bella (2023), Moralitas individu dalam penerapan moralitas individu sebagai variabel yang memperkuat hubungan antara variabel *Good Governance* terhadap *Fraud Intention*, dimana *Fraud Intention* yang timbul pada pegawai dapat dikurangi dengan adanya moralitas individu yang baik. Tata kelola pemerintah yang baik juga dapat menekan *Fraud Intention* karena dengan adanya tata kelola yang baik seperti penegakan aturan dan sanksi bagi oknum pegawai yang melanggar akan menimbulkan rasa takut untuk melakukan pelanggaran. Pada penelitian yang dilakukan oleh Widiantari & Bella (2023) Moralitas individu mampu memperkuat hubungan *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud* pada BPKAD Kabupaten Badung.

H₄: Moralitas individu dapat memoderasi hubungan antara *Good Governance* terhadap *Fraud Intention*

- 5) Moralitas individu memoderasi hubungan antara sistem pengendalian internal terhadap *Fraud Intention*

Moralitas merupakan suatu prinsip atau nilai seseorang yang dapat bernilai baik atau buruk. *Fraud Intention* terkait dengan moralitas individu karena jika mempunyai capability (kemampuan) dengan memanfaatkan kesempatan (*oportunity*) yang ada untuk melakukan tindakan kecurangan pada intenal organisasi/perusahaan. Orang yang tidak memiliki moralitas individu yang bagus akan suka untuk melakukan tindakan yang tidak etis.

Teori *Fraud Hexagon* yang dikemukakan oleh oleh Georgios L. Vousinas (2019) menyebutkan bahwa kecurangan terjadi karena adanya enam elemen yaitu stimulus, capability, opportunity, rationalization, ego, dan collusion. Pengendalian internal yang dilakukan baik pimpinan maupun pegawai dapat dipengaruhi oleh moralitas yang dimiliki anggota organisasi. Tingginya moralitas pegawai ditandai dengan patuhnya seorang karyawan pada kebijakan perusahaan serta berkeinginan kuat untuk melindungi aset perusahaan/organisasi (Megawati & Reskino, 2023). Dalam arti lain, moralitas individu dapat menciptakan sistem pengendalian internal yang baik, sehingga berpengaruh terhadap kurangnya potensi adanya kecurangan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Megawati & Reskino (2023) menjelaskan bahwa moralitas individu memperkuat hubungan antara pengendalian internal dan pencegahan kecurangan. Pada penelitian lain yang

dilakukan oleh Dwiyanti (2022) Moralitas individu dapat memperkuat hubungan sistem pengendalian internal pada pencegahan kecurangan.

H₅ : Moralitas individu dapat memoderasi hubungan antara pengendalian internal terhadap *Fraud Intention*

- 6) Moralitas individu memoderasi hubungan antara *whistleblowing system* terhadap *Fraud Intention*

Moralitas merupakan prinsip seseorang untuk bertindak dengan mempertimbangkan penilaian terlebih dahulu apakah tindakan tersebut etis atau tidak (Prena & Kusmawan, 2020). *Capability* (kemampuan) memiliki keterkaitan hubungannya terhadap moralitas individu. Dengan adanya *capability* (kemampuan) seseorang memanfaatkan kondisi demi melakukan kecurangan. Moralitas individu yang tinggi tidak dengan mudah untuk melakukan kecurangan. Apabila seseorang memiliki moralitas yang baik, ia akan berpikir jauh sebelum memutuskan untuk bertindak (Dwiyanti, 2022). Sehingga, apabila ditemukan indikasi pelanggaran pada suatu organisasi maka dapat segera dilakukan pemeriksaan terhadap pelanggar. Apabila moralitas individu sudah baik maka hal tersebut akan meminimalisir rasa ingin berbuat curang.

Penelitian yang dilakukan oleh Megawati & Reskino (2020) moralitas individu memperkuat hubungan antara *whistleblowing system* dan pencegahan kecurangan. Artinya tingginya moralitas individu dapat memperkuat prinsip seseorang dalam melakukan *whistleblowing* tanpa harus

takut dengan rekan kerja lainnya agar dapat mencegah dan menurunkan intensi kecurangan.

H₆ : Moralitas individu dapat memoderasi hubungan antara *whistleblowing system* terhadap *Fraud Intention*

2.4 Model Penelitian

Pada penelitian ini variabel independen adalah *Good Governance*, *pengendalian Internal*, dan *whistleblowing system*. Sedangkan untuk variabel dependen adalah *Fraud Intention*. Tetapi, pada penelitian ini menambahkan moralitas individu sebagai variabel moderasi sebagai pengukur seberapa besar pengaruhnya, mempunyai pengaruh kuat atau lemahnya hubungan variabel eksogen ke variabel endogen. Untuk memperjelas model/rancangan penelitian dapat diperhatikan pada gambar ilustrasi sebagai berikut :

Gambar 2. 1 Model Penelitian

